

PROVINCIALIZING DEMOCRACY

Keragaman Musyawarah-Mufakat dan Imajinasi Politik Alternatif

Response atas buku Desain Ulang Demokrasi Indonesia:

Reaktualisasi Prinsip Musyawarah Mufakat — Penerbit Buku Obor, 2026

Dr. Imam Ardhianto

Pertanyaan Permulaan Diskusi

- Apakah demokrasi modern universal dan musyawarah mufakat partikular/beragam? Ataukah sebaliknya?
- Jika memang beragam, bagaimana sejarah dan proses kontekstualisasi kultural berperan atas kemunculan keragaman tersebut, dan konteks ekonomi-politik apa yang mensituasikan praktik demokrasi/musyawarah tersebut?
- Jika memang beragam: mekanisme kuasa apa dan siapa yang bekerja dalam upaya mendesain, mempraktikkan, atau memaksa sekelompok orang untuk berdemokrasi dengan cara tertentu? Jika memang beragam bagaimana ditengah keragaman tertentu, satu bentuk mekanisme menjadi dominan dan teristimewakan?
- Siapa yang berhak menentukan arti demokrasi, dan atas beban siapa satu definisi legal diistimewakan di atas yang lain?

“There Never Was a West” — David Graeber

- Secara etimologis *dēmokratia* (*dēmos* + *kratos*) lahir di Athena abad ke-5 SM — tapi kata “rakyat” sudah ambigu sejak hari pertama: siapa yang sebenarnya berkuasa?
- Graeber membantah kisah standar bahwa demokrasi adalah penemuan khas Barat yang diwariskan ke negara-bangsa liberal modern.
- Demokrasi — pengambilan keputusan kolektif antar-setara — muncul di mana-mana: republik India kuno, konsensus masyarakat adat Amerika Utara, masyarakat acephalous Asia Tenggara.
- Ia lahir di “ruang-ruang antara”, zona persentuhan kebudayaan — bukan pengejawantahan satu peradaban murni.
- Konsekuensinya: menyucikan satu bentuk tunggal adalah tindakan politis, bukan sekadar pilihan teknis.

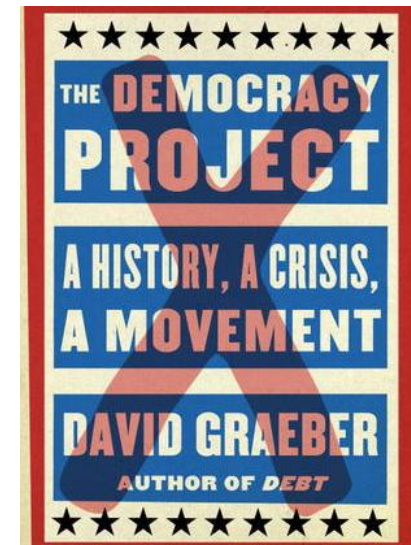
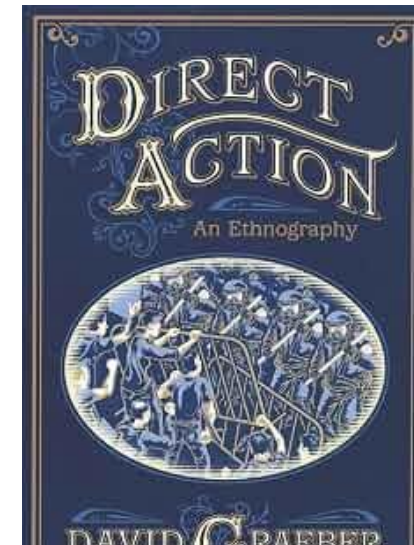


“We are usually told that democracy originated in ancient Athens - like science, or philosophy, it was a Greek invention. It’s never entirely clear what this is supposed to mean. Are we supposed to believe that before the Athenians, it never really occurred to anyone, anywhere, to gather all the members of their community in order to make joint decisions in a way that gave everyone equal say?”

~DAVID GRAEBER

Konsensus sebagai prinsip, bukan aturan

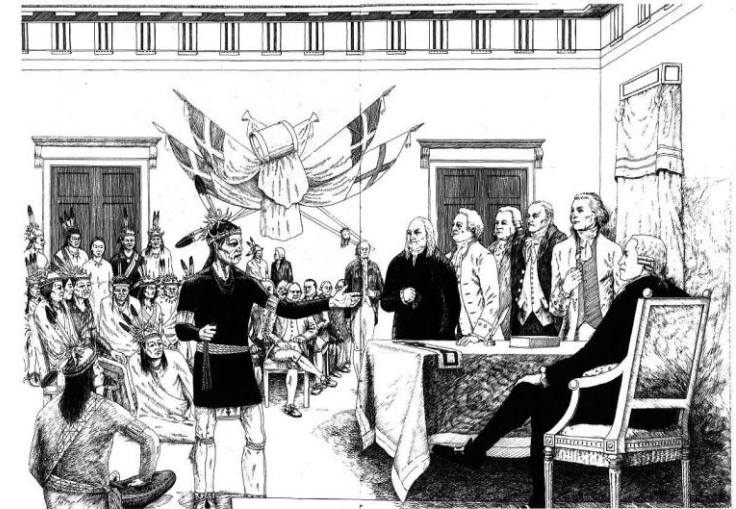
- Membangun konsensus, berdebat, berbeda pendapat dari posisi setara adalah dasar hampir semua bentuk pertalian sosial.
- Occupy Wall Street: “kelompok proses” memfasilitasi keputusan berbasis konsensus — setiap peserta membangun di atas kontribusi yang lain, alih-alih menang-kalah.
- Graeber menegaskan konsensus adalah seperangkat prinsip, bukan aturan kaku; bila dibekukan jadi prosedur formal ia bisa berbalik menindas.
- Patologinya jujur diakui: mereka yang paling banyak waktu luang bisa mendominasi; hanya usulan paling tidak ambisius yang lolos.
- Setiap bentuk demokrasi punya patologinya sendiri — termasuk musyawarah-mufakat. Kejujuran inilah yang absen bila musyawarah diajukan sebagai obat mujarab.



5

MUSYAWARAH SEBAGAI HABITUS

- Kesiediaan mendengar, kesabaran berdebat, menahan diri dari dominasi adalah disposisi yang dibentuk lewat pembiasaan panjang di ranah yang egaliter. Karena itu musyawarah tidak bisa “diinstal” lewat pidato, kurikulum, atau pasal undang-undang — ia habitus yang harus dihidupi.
- Orde Baru (penataran P4) membuktikan kegagalan instalasi dari atas: musyawarah diajarkan sebagai kata, tapi habitus yang terbentuk adalah kepatuhan. Hasilnya: warga yang hafal istilah namun kehilangan praktiknya. Bagaimana dengan buku dan karya-karya ilmuwan mengenai demokrasi? Bagaimana jika di tempat kerja, juga di kampus tidak ada demokrasi dan musyawarah?
- Bahkan filosof dan juga pendiri dasar konstitusi US, dalam sejarah belajar banyak dalam encounter mereka dengan native American (Iroquis League di great lake) dalam membayangkan arti konfederasi dan pengambilan Keputusan.
- Gagasan freedom itu sendiri lahir dari Kandiaronk, tokoh intelektual native American, di abad 16 berdialog di Salon-salon di Paris, Ketika Rousseau menulis social contract.



On June 11 1776, an Onondaga sachem gave John Hancock an Iroquois name at Independence Hall. Copyright 1991 by John Kanevitch Fadden



Kisah demokrasi di Nusantara: Musyawarah sebagai praktik yang menyejarah, bukan sekedar cita-cita ideal

- Kawamura: musyawarah adalah etos gotong-royong di majelis desa — mayoritas dan minoritas saling mendekat lewat sintesis, bukan sekedar hitung suara.
- Kasus Wajo, Jawa, Minangkabau, dan Kalimantan Barat adalah nilai musyawarah yang berartikulasi dengan sejarah ekonomi politik regional, bermusyawarah dan dalam hal ini juga berdemokrasi diperlukan dalam koeksistensi dan gesekan antar kepentingan dan nilai. Nomadik — Kerajaan, osilasi egalitarian dan hirarki kesultanan dll.
- Etnografi Sulawesi Tengah dan juga ulasan Pujo Semedi di Kalimantan Barat dan Jawa: warga pedesaan memakai musyawarah untuk melawan ekstraksi sumber daya — senjata politik yang hidup, bukan nostalgia.
- Tapi musyawarah tidak tanpa cacat, mekanisme Padiatapa/FPIC sberapapun ideal bisa mengeksklusi dan membuat polarisasi di tingkat masyarakat adat.
- Suara yang harus didengar: masyarakat adat, petani, buruh, dan kolektif Generasi Z — untuk sungguh mengetahui ragam demokrasi dan konsekuensinya. Tradisi non-negara & corak anarkis di Sumatra, Kalimantan, dan tanah Alifuru menantang asumsi bahwa satu-satunya wadah demokrasi adalah negara-bangsa.
- Inilah kebutuhan *provincializing* demokrasi

China Whole-Process Democracy

Klaim / Janji

- Model konsekuensialis: dinilai dari seberapa baik memperbaiki hidup sosial-ekonomi rakyat, bukan semata prosedur elektoral.
- Democracy at Work – R. Wolff
- Kritik atas sistem di mana “rakyat hanya dibangun saat memilih”.
- Contoh: regenerasi partisipatif Desa Minzhu, Chongqing — direvitalisasi, bukan digusur.



PENUTUP

Dari masalah desain ke masalah kuasa di tengah keragaman budaya musyawarah dan pengampunya

- Kata “musyawarah” menunjuk dua arah bertolak belakang: whole-process yang dikelola dari atas (gema integralisme Soepomo) — atau solidaritas egaliter yang hidup ketika negara menjauh.
- Memilih salah satunya tanpa menyebut namanya adalah keputusan politik yang disamarkan sebagai apresiasi budaya.
- Pertanyaan pemandu bukan “bentuk mana yang paling asli? Dan demokrasi ideal itu apa” melainkan “siapa yang berhak ikut menentukan, dan bagaimana menjaga agar tak satu makna memonopoli sisanya?”
- Musyawarah bukan pasal legal atau desain yang bisa diberlakukan — ia habitus yang harus dihidupi, dalam sejarah ekonomi politik.

Perdebatan tak henti tentang apa arti demokrasi justru adalah demokrasi itu sendiri sedang bekerja.